

**PERANAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL PADA KELURAHAN
KENANGAN KECAMATAN PERCUT
SEI TUAN KABUPATEN DELI
SERDANG**

SKRIPSI

**OLEH
LESTARI LAWOLO
198520120**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)27/10/23

**PERANAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL PADA KELURAHAN
KENANGAN KECAMATAN PERCUT
SEI TUAN KABUPATEN DELI
SERDANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Administasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area



OLEH

LESTARI LAWOLO

198520120

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/10/23

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Peranan Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Sosial Pada
Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten
Deli Serdang
Nama : LESTARI LAWOLO
NPM : 198520120

Diketahui Oleh

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos. M.Si



Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I. Pol

Mengetahui



Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si
Dekan



Khairunnisah Lubis S. Sos, M. I. Pol
Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 30 September 2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/10/23

PENGAJUAN KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Medan Area

Nama : LESTARI LAWOLO

NPM : 198520120

Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

Berencana akan melakukan penelitian dengan judul :

1. PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PADA KELURAHAN KENANGAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG
2. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN KENANGAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG.

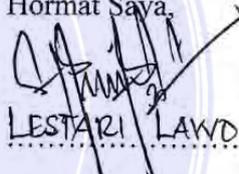
Dengan dosen pembimbing :

1. DR. RUDI SALAM SINAGA, S.Sos, M.Si
2. KHAIRUNNISAH LUBIS, S.Sos, M.I.Pol

Demikian surat permohonan pengajuan judul dan dosen pembimbing ini dibuat untuk dapat ditentukan oleh ketua Program Studi Ilmu.....

Medan, 18 Oktober 2022

Hormat Saya,



LESTARI LAWOLO

Judul Penelitian yang disetujui No : (..I..)

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PADA KELURAHAN KENANGAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG.

Dengan dosen pembimbing :

1. Ketua/ Pembimbing I : DR. RUDI SALAM SINAGA, S.Sos, M.Si
2. Anggota/ Pembimbing II : KHAIRUNNISAH LUBIS, S.Sos, M.I.Pol
3. Sekretaris : HIKMAWAN SYAHPUTRA, S.Ip, M.A.

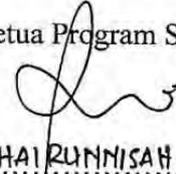
Catatan :

.....
.....
.....

Medan, 18 Oktober 2022

Disetujui oleh

Ketua Program Studi.....



KHAIRUNNISAH LUBIS, S.Sos, M.I.Pol

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LESTARI LAWOLO
NPM : 198520120
Tempat/Tanggal Lahir : Hiligodu Somolomolo, 21 Agustus 1998
Alamat : Jl. Kenari 12 No. 385

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“Peranan Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Sosial Pada Kelurahan Kenanga Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”** adalah hasil pekerjaan saya dan seluruh ide, pendapat, materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai dengan daftar pustaka yang dilampirkan.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan kepada saya termasuk pencabutan gelar Sarjana Administrasi Publik yang nanti saya dapatkan.

Medan, 30 Septembe 2023


LESTARI LAWOLO
198520120

SEPLUH RIBU RUPIAH
METERAL TEMPEL
19E87AJX140119183

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/ SKRIPSI/ TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
dibawah ini :

Nama : LESTARI LAWOLO
NPM : 198520120
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Noneklusif (*Non-exclusif Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Peranan Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Sosial Pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir /skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta, Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 30 September 2023

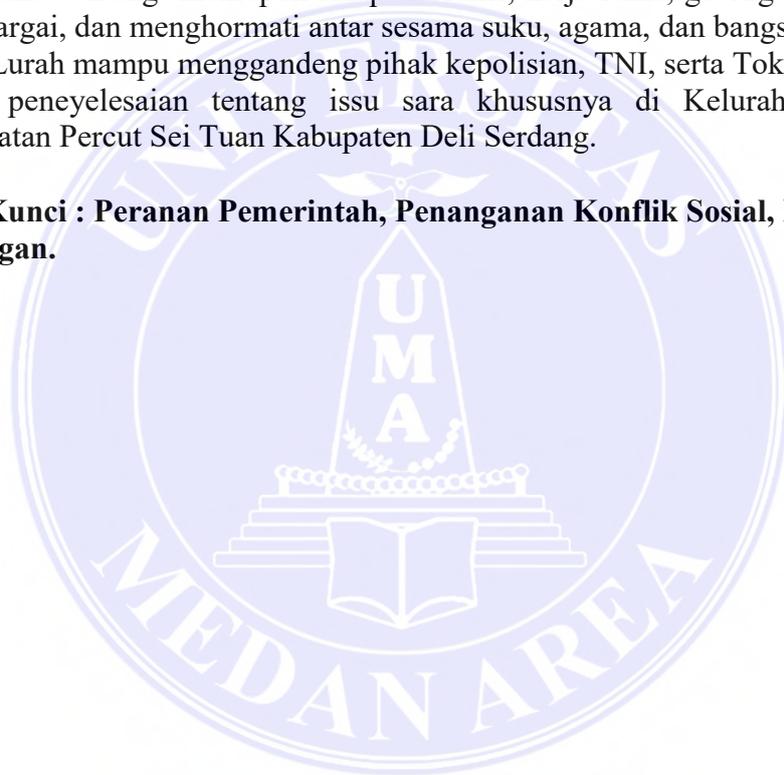


LESTARI LAWOLO

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah dalam penanganan konflik sosial pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dan upaya peranan pemerintah dalam penanganan konflik sosial pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Jenis metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peranan Lurah dalam Penanganan Konflik Sosial pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sudah tergolong cukup baik hal ini Lurah memberikan pada masyarakat berbagai edukasi dan pemahaman mengenai keberagaman suku, budaya, dan agama. Selain itu, Lurah juga memberikan pada masyarakat tentang memupuk sikap toleransi, kerja sama, gotong royong, saling menghargai, dan menghormati antar sesama suku, agama, dan bangsa. Selanjutnya Peran Lurah mampu menggandeng pihak kepolisian, TNI, serta Tokoh masyarakat dalam penyelesaian tentang isu sara khususnya di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

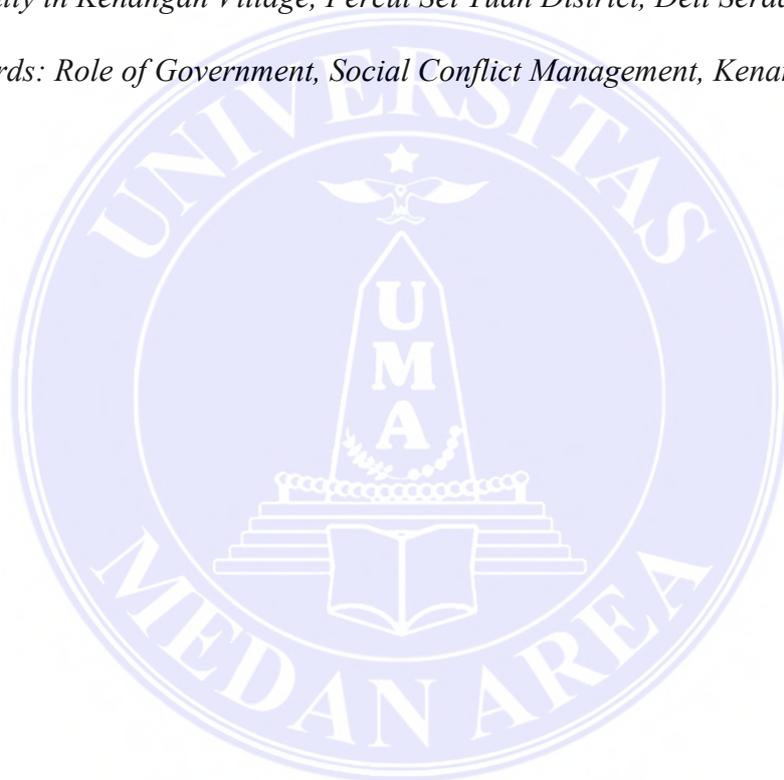
Kata Kunci : Peranan Pemerintah, Penanganan Konflik Sosial, Kelurahan Kenangan.



ABSTRACT

Goal achieved from this research is to find government handling social conflict in Kenangan Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. How efforts government's handling social conflict in Kenangan Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. Research method is a qualitative method descriptive approach. Results research Lurah Handling Social Conflict Kenangan Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency quite good, Lurah providing various education and understanding community about ethnic, cultural and religious diversity. Addition, lurah also gave information community about cultivating tolerance, cooperation, mutual cooperation, mutual respect and respect among fellow ethnicities, religions and nations. Furthermore, Lurah was cooperate with the police, TNI, and community leaders solving sara issue, especially in Kenangan Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency.

Keywords: Role of Government, Social Conflict Management, Kenangan Village.



RIWAYAT HIDUP

1. Data pribadi

Nama : LESTARI LAWOLO
Tempat tgl/lahir : Hiligodu Somolomolo, 21 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Anak ke : 6 dari 5 bersaudara
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Kenari 12 No. 385
Email : lisilawolo@gmail.com

2. Nama orang tua

Nama ayah : Fadaosi Lawolo
Nama ibu : Alina Hura (Alm)
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Hiligodu Kecamatan Somolomolo

3. Pendidikan

2005-2011 : SD Negeri No. 076438 Hiligodu Somolomolo
2011-2015 : SMPN 1 Bawolato
2015-2018 : SMA Swasta Parulian 2 Medan
2019-2023 : Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan kuasa-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan melengkapi tugas akhir yang diberikan oleh Universitas Medan Area yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Pada penelitian ini terdapat banyak kesulitan. seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur dan keterbatasan kemampuan menulis. Namun, dengan adanya kemauan dan rasa tanggungjawab yang dilandasi i'tikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat teratasi dengan maksimal. Adapun judul penelitian ini adalah **“Peranan Pemerintah dalam Penanganan Konflik Sosial pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”**. Selama penulisan skripsi penelitian ini telah banyak pihak yang turut membantu, maka penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan motivasi juga bantuan, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M. I.Pol, selaku Ketua Program Studi Ilmu Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. sekaligus Dosen Pembimbing II.
4. Bapak Dr. Rudi Salam Sinaga. S.Sos. M.Si, selaku Pembimbing I yang penuh kesabaran dan pengertian telah membimbing hingga selesainya penelitian ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua staf administrasi Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan terima-kasih sedalam-dalamnya kepada orang tua dan keluarga tercinta atas doa dan dukungannya, juga kepada teman-teman khususnya angkatan tahun 2019 yang telah memberikan semangat kepada penulis.

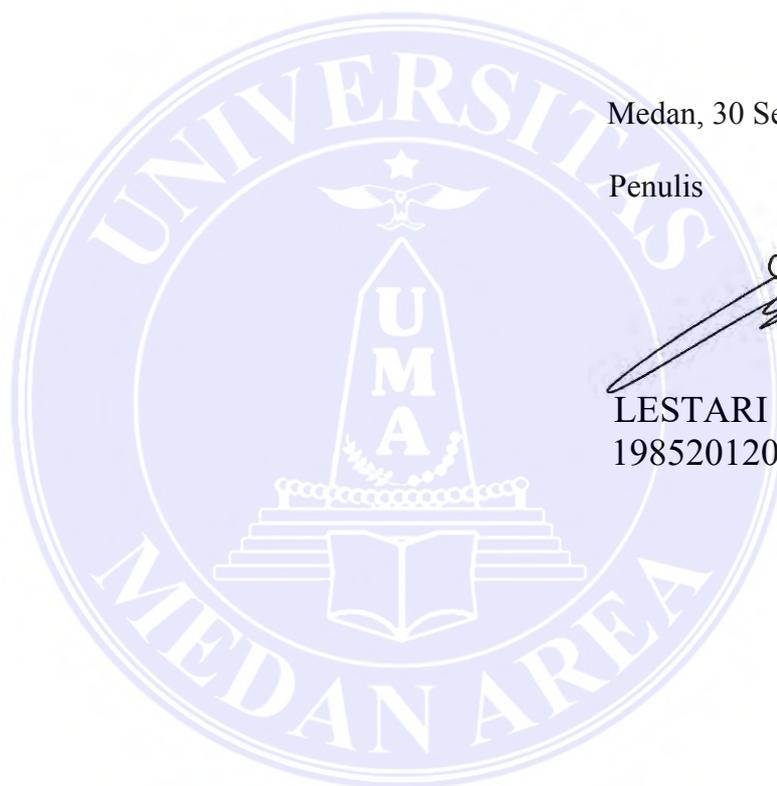
Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga penelitian ini dapat digunakan kembali dan bermanfaat bagi semua kalangan.

Medan, 30 September 2023

Penulis



LESTARI LAWOLO
198520120



DAFTAR ISI

HALAMAN

ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peranan Pemerintah.....	7
2.2. Pengertian Penanganan Konflik Sosial	12
2.2.1. Pengertian Penanganan Konflik	12
2.2.2. Jenis-jenis Konflik.....	14
2.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konflik	16
2.2.4. Upaya-upaya Untuk Mengatasi Konflik.....	19
2.2.5. Pengertian Sosial	22
2.3. Penelitian Terdahulu.....	24
2.4. Kerangka Berpikir	26

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode	28
3.2. Lokasi Penelitian dan Waktu.....	28
3.3. Teknik Pengumpulan Data	29
3.4. Teknik Analisis Data	31

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum	33
4.1.1. Sejarah Kelurahan Kenangan Baru	33
4.1.2. Visi dan Misi	34
4.1.3. Struktur Organisasi	42
4.2. Hasil Penelitian	45
4.2.1. Peranan Pemerintah dalam Penanganan Konflik Sosial pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	45
4.2.2. Hambatan dan Upaya Peranan Pemerintah dalam Penanganan Konflik Sosisl pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ...	66
4.3. Pembahasan	69

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Konflik Sosial.....	4
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Wawancara Penelitian	77
Lampiran II Panduan Wawancara	78
Lampiran III Dokumentasi Penelitian	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia tidak terlepas dari yang namanya konflik, dimana konflik selalu hadir di setiap negara termasuk di Indonesia. Ada dua macam konflik yaitu konflik individu dan konflik kelompok. Konflik individu dapat berubah menjadi konflik kelompok, karena adanya kecenderungan individu untuk melibatkan setiap anggota kelompok. Solidaritas kelompok sering menjadi penyebab bagi kelompok untuk membela anggotanya, meskipun tidak mengetahui penyebab timbulnya konflik. Konflik merupakan bagian dari demokrasi, karena ciri tatanan demokrasi adalah adanya peluang bagi kemerdekaan pemikiran konsensus, dan perbedaan pendapat, serta partisipasi politik, manajemen konflik secara damai, dan pembatasan kekerasan; serta luasnya kepercayaan dan loyalitas terhadap pemerintah yang konstitusional dan demokratis.

Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul, karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik, serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial. Konflik memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari konflik sosial adalah konflik tersebut memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan. Kebanyakan konflik tidak berakhir dengan kemenangan disalah satu pihak dan kekalahan pada pihak lainnya. Konflik yang terjadi di Indonesia, ada juga yang dapat diselesaikan dengan baik, hingga berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat, akan tetapi ada beberapa konflik justru berdampak negatif hingga mengakibatkan timbulnya kerusakan, menciptakan ketidak stabilan,

ketidakharmonisan, dan ketidak amanan bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Munculnya ketegangan atau konflik antar kelompok, biasanya terkait dengan kuatnya solidaritas kelompok pada satu pihak dan rentangnya hubungan sosial dari satu kelompok terhadap kelompok lain, karena tiap kelompok mengembangkan mitos ideologi masing-masing. Maurice duverger mengatakan “mitos dan ideologi cenderung memperkuat konflik politik”. konflik dapat dibedakan menjadi dua yaitu konflik nyata dan konflik tidak nyata.

Konflik nyata ditimbulkan dari rasa frustrasi karena tuntutan tertentu yang tidak sesuai dengan harapannya yang ingin dicapai oleh partisipasi. Adapun konflik tidak nyata bukan disebabkan oleh tujuan-tujuan yang antagonis, melainkan kebutuhan untuk membebaskan ketegangan yang agresif dalam suatu interaksi. Dalam hal lain, pilihan yang berlawanan bergantung pada faktor yang menentukan dan tidak secara langsung berhubungan pada masalah yang diperdebatkan dan tidak berorientasi pada hasil yang ingin di capai secara spesifik. Untuk menyelesaikan konflik, diperlukan konsensus. Konflik dan konsensus merupakan gejala sosial yang selalu ada di dalam setiap masyarakat. Selama masyarakat ada, selama itu pula konflik dan konsensus ada di dalam masyarakat.

Hal ini berkaitan dengan pandangan pendekatan konflik dalam ilmu sosial, bahwa setiap masyarakat mengandung konflik di dalam dirinya, atau konflik merupakan gejala yang melekat dalam setiap masyarakat. Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik. Pencegahan Konflik dilakukan

antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai; meredam potensi Konflik; dan membangun sistem peringatan dini.

Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik dilakukan melalui upaya penghentian kekerasan fisik; penetapan Status Keadaan Konflik; tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Status Keadaan Konflik berada pada keadaan tertib sipil sampai dengan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959. Selanjutnya, Penanganan Konflik pada pascakonflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi; rehabilitasi; dan rekonstruksi. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dan pendanaan penanganan konflik.

Interaksi sosial terjadi jika dua orang bertemu, kemudian saling menegur sapa, berjabat tangan bahkan sampai terjadi perkelahian ataupun konflik dan sebagainya. Dari peristiwa tersebut terdapat dua pihak dimana salah satu pihak memberikan aksinya kemudian pihak lainnya memberikan respons (reaksi) terhadap aksi tersebut, maka dari sinilah kegiatan antara aksi dan reaksi dimulai. Kegiatan manusia dimana salah satu pihak memberikan aksinya dipihak lain meresponnya atau memberikan reaksi, maka kegiatan itu disebut interaksi. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi pula di dalam masyarakat. Interaksi tersebut lebih nyata ketika terjadi benturan antara kepentingan perorangan dan kelompok-kelompok, jika antar kelompok terdapat kesamaan-kesamaan tertentu maka akan terjadi kerja antar kelompok sosial,

sebaliknya jika diantara kelompok-kelompok terdapat beberapa perbedaan, maka kemungkinan akan terjadi konflik antar kelompok sosial. Interaksi sosial hanya berlangsung antar pihak-pihak jika terjadi reaksi terhadap dua belah pihak.

Berikut kejadian konflik sosial di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang :

Tabel 1.1.
Konflik Sosial di Kelurahan Kanangan Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang

No	Tahun	Konflik Sosial	Lokasi
1	2020	Isu Sara	Kelurahan Kenangan
2	2021	Bentrokan Kalangan Remaja	Kelurahan Kenangan

Sumber: Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan. 2023

Kelurahan Kenangan pada awalnya adalah kelurahan yang memiliki kultur budaya yang kental akan keagamaan dan nilai-nilai sosial budaya, warga masyarakatpun selalu rukun dalam kehidupan sosial ketika terjadi suatu persoalan yang menjadikan warga berpecah karena lahirnya suatu kesalah pahaman sehingga terjadi suatu perpecahan di masyarakat. Masyarakat Kelurahan Kenangan adalah merupakan didominasi etnik Batak, sebagian masyarakatnya berdagang minuman keras tradisional atau disebut dengan Tuak, ketika keberadaan warung tuak tersebut sangat meresahkan masyarakat setempat disebabkan mengundang keributan, bagi warga yang berdekatan dengan warung tuak tersebut merasa terganggu, sehingga masyarakat setempat memberikan suatu teguran namun tidak diindahkan oleh para penghuni warung tuak tersebut, sehingga terjadila konflik antar warga dan saling serang dan lempar sehingga mengenai suatu rumah ibadah, dengan adanya pelemparan rumah ibadah (masjid) tersebut maka beberapa diantara warga memprovokasi suasana malah bukan membaik, namun semakin buruk menjadi kearah konflik isu sara. Maka itu,

pertikaipun terjadi antara masyarakat Jalan Rajawali dengan Jalan Belibis Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Bukan sampai disitu saja, konflik sosial juga terjadi dikalangan remaja yang kejadiannya juga ditempat yang sama, yaitu di Jalan Rajawali Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Perkelahian antar warga yang terjadi diantaranya adanya para remaja yang pulang dari sekolah mereka saling mengolok-olok sehingga terjadi perkelahian yang tak terelakkan, hal ini sangat meresahkan masyakat dan keadaan menjadi sunyi dan mencekam.

Pihak pemerintah harusnya menindak lanjuti dan menertibkan warung tuak, serta pertikaian diantara kalangan remaja. Maka dari itu masyarakat juga lebih bijak menerima, menanggapi dan menyaring setiap informasi yang beredar agar tidak menambah simpang siur dan kebingungan di masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas merupakan alasan penulis untuk meneliti lebihlanjut tentang Konflik Sosial. Untuk itu, penulis mengangkat kedalam sebuah judul **“Peranan Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Sosial Pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pemerintah dalam penanganan konflik sosial pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana faktor hambatan dan upaya peranan pemerintah dalam

penanganan konflik sosial pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei
Tuan Kabupaten Deli Serdang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah dalam penanganan konflik sosial pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
2. Untuk mengetahui apa faktor hambatan dan upaya peranan pemerintah dalam penanganan konflik sosial pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik terutama dalam Sumber Daya Manusia. Dapat dijadikan bahan informasi bagi penelitian, yakni mempelajari masalah peranan pemerintah dalam penanganan konflik sosial.
2. Secara praktis dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah umumnya dan khususnya Kantor Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk memperhatikan dan meningkatkan peranan pemerintah dalam penanganan konflik sosial yang telah dilaksanakan selama ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peranan Pemerintah

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 2018:23). Selanjutnya Amba (2018:23), menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya.

Peranan (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2014:243).

Hal demikian menunjukkan bahwa peranan dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peranan dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto, 2014: 244):

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam

masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peranan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan.

Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam Muluk (2015:62-63), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rentang tanggung jawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Merton dalam Raho (2017: 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (roleset). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-

status sosial khusus. Wirutomo (2011: 99-101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan peradilan.

Pemerintahan dalam arti luas menurut Frederich dalam Tutik (2019:97) dalam adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri. Pemerintahan semata-mata tidak hanya sekedar menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan secara horisontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal. Menurut pendapat Jimly Asshidiqie pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara verikal ke bawah. Pembagian kekuasaan secara vertikal berarti adanya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Konstelasi ini, tidak mengherankan bila keberadaan desentralisasi lebih dipahami pemerintah daerah sebagai kewajiban daripada sebagai hak. Kajian penelitian dipersempit melalui peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antar kelompok dengan teori Schulte Nordholt (2017: 71), yang diperjelas dengan indikator sebagai berikut:

1. Arbitrase

Pada porsi arbitrase, pengambil keputusan adalah arbiter, yang juga bertugas mengendalikan proses yang terjadi (kebanyakan secara informal). Seorang arbiter haruslah seseorang yang independen dan netral. Arbiter akan menerima masalah, gagasan, materi latar belakang lalu memutuskan penyelesaian masalah. Hasil yang muncul merupakan kompromi, yaitu antara apa yang diinginkan oleh pihak yang bertikai berdasarkan bukti dan penilaian teknis.

2. Pemerintah sebagai Negosiator

Dalam egosiasi ada aktifitas dari kedua pihak untuk saling mempengaruhi yang bertujuan agar salah satu pihak terpengaruh dan mau menerima apa yang menjadi keinginan dari pihak lain. Aktivitas ini lebih dikenal dengan lobbying.

Dalam proses negosiasi lobbying tidak pernah terpisahkan. Untuk kesepakatan

dalam negosiasi ternyata lobby sangat efektif karena negosiasi bisa terjadi apabila aktivitas lobbying mendapat respon dari pihak yang berkonflik. Negosiasi lebih kepada penyelesaian yang “*win-win solution*”

3. Mediator

Berkenan dengan peran Pemerintah dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan masyarakat, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang baik untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik agar mereka bisa menyampaikan secara langsung keluhan dan tuntutan dalam pertemuan (Wahyudi 2016), dimana pertemuan ini dapat dimanfaatkan oleh mediator untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan konflik yang terjadi.

Konflik merupakan hal yang sangat penting dilakukan pengidentifikasian kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak dalam mencari informasi yang berhubungan dengan perbedaan-perbedaan antara dua pihak yang menyebabkan terjadinya konflik. Pertemuan ini dilakukan untuk mencari kata sepakat baik lisan maupun tulisan dalam rangka mengakhiri konflik yang terjadi (Wahyudi 2016). Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi konflik. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu. Efektivitas penengahan tergantung juga pada bakat dan ciri perilaku mediator.

2.2. Pengertian Penanganan Konflik Sosial

2.2.1. Pengertian Penangan Konflik

Dr. Robert H. Lauer. (2016:98) Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya.

Konflik dapat diselesaikan, sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan. Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan.

Istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.

Konflik artinya perpecahan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan.³ Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompokkelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.

Menurut lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber² kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.

Sesuai dengan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah perpecahan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan

eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

2.2.2. Jenis-jenis Konflik

Menurut Hani Handoko (2015:349) Ada lima jenis konflik dalam kehidupan organisasi:

- a. Konflik dalam diri individu, yang terjadi bila seorang individu menghadapi ketidak pastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya.
- b. Konflik antar individu dalam organisasi yang sama, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik juga berasal dari adanya konflik antar peranan (seperti antar manajer dan bawahan).
- c. Konflik antara individu dan kelompok, yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok.
- d. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, karena terjadi pertentangan kepentingan antar kelompok.
- e. Konflik antar organisasi, yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara, konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi, jasa, harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya lebih efisien.

Adapun indikator konflik adalah berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik sebagai berikut:

1. Konflik Vertikal Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.
2. Konflik Horizontal Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa.
3. Konflik Diagonal Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh . Soerjono Soekanto membagi konflik sosial menjadi lima bentuk yaitu:
 - 1) Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.
 - 2) Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras.
 - 3) Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.
 - 4) Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok.
 - 5) Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. Sementara itu, Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.
- 2) Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
- 3) Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
- 4) Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara, atau organisasi internasional.

2.2.3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Menurut Hani Handoko (2015:351) Dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik dalam perusahaan dapat dikelompokkan dalam 3 hal yang utama yaitu:

- a. Komunikasi : salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti, atau informasi yang mendua dan tidak lengkap, serta gaya individu manajer yang tidak konsisten.
- b. Struktur : pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumber daya-sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka.
- c. Pribadi : ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka, dan perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2015:361) Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidak merataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan aset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian aset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya. Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut sebagai status quo dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai status need. Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, yaitu:

1. Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara.

2. Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial.

Menurut Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2012:68) menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu: Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Membinasakan disini tidak selalu diartikan sebagai pembinasakan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui.

Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada

kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan.

Perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana.

Perbedaan pendirian, budaya, kepentingan, dan sebagainya tersebut diatas sering terjadi pada situasi-situasi perubahan sosial. Dengan demikian perubahan-perubahan sosial itu secara tidak langsung dapat dilihat sebagai penyebab juga terjadinya (peningkatan) konflik-konflik sosial. Perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat akan mengakibatkan berubahnya sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat ini akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pendirian dalam masyarakat.

2.2.4. Upaya-upaya Untuk Mengatasi Konflik

Menurut Astrid Susanto (2016:70) Dampak dari Adanya Konflik terhadap Masyarakat Tak perlu diragukan lagi, proses sosial yang namanya konflik itu adalah suatu proses yang bersifat disosiatif. Namun demikian, sekalipun sering berlangsung dengan keras dan tajam, proses-proses konflik itu sering pula mempunyai akibat-akibat yang positif bagi masyarakat. Konflik-konflik yang berlangsung dalam diskusi misalnya, jelas akan unggul, sedangkan pikiran-pikiran yang kurang terkaji secara benar akan tersisih. Positif atau tidaknya akibat konflik-konflik memang tergantung dari persoalan yang dipertentangkan, dan

tergantung pula dari struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik.

Oleh karena itu ada dua dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat yaitu:

a. Dampak positif dari adanya konflik

2. Bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-group suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antara kelompokkelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar.
3. Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat.

b. Dampak negatif dari adanya konflik

1. Hancurnya kesatuan kelompok. Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah barang tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran..
2. Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi beringas, agresif dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan.
3. Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada hancurnya

nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidak patuhan anggota masyarakat akibat dari konflik.

4. Upaya-upaya Untuk Mengatasi Konflik Secara sosiologi, proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan (*associative processes*) dan proses sosial yang menceraikan (*dissociative processes*). Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas. Sebaliknya proses sosial yang bersifat dissosiatif mengarah pada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan, perpecahan dan sebagainya. Jadi proses sosial asosiatif dapat dikatakan proses positif. Proses sosial yang dissosiatif disebut proses negatif. Sehubungan dengan hal ini, maka proses sosial yang asosiatif dapat digunakan sebagai usaha menyelesaikan konflik. Adapun bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi (paksaan), *détente*. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika cara pertama membawa hasil.

Menurut Soetomo (2015:22) , bentuk-bentuk pengendalian konflik ada enam yaitu:

1. Konsiliasi (*conciliation*)

Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-

keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.

2. Mediasi (*mediation*)

Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.

3. Arbitrasi berasal dari kata latin *arbitrium*, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (*arbiter*) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang *arbiter* memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi.

4. Perwasitan Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

2.2.5. Pengertian Sosial

Astrid S. Susanto (2013:9) Konsep sosial adalah konsep keseharian yang digunakan untuk menunjuk sesuatu dan yang dipahami secara umum dalam masyarakat. Sedangkan konsep sosiologis merupakan konsep yang digunakan sosiologi untuk menunjuk sesuatu dalam konteks akademik. Sosiologi ialah suatu ilmu mengenai “*das sein*” dan bukan “*das sollen*”. Sosiologi meneliti masyarakat serta perubahannya menurut keadaan kenyataan. Sehubungan dengan perkataan sosiologi, perkataan sosial haruslah ditinjau sebagai semua kegiatan yang ada

hubungannya dengan masyarakat luas, sesuai dengan perkataan asalnya “sozius” yang berarti “teman”.

Perkataan sosial telah mendapat banyak interpretasi pula, walaupun demikian, orang berpendapat bahwa perkataan ini mencapai reciprocal behavior atau perilaku yang saling mempengaruhi dan saling tergantungnya manusia satu sama lain. Suatu pengertian yang lebih jelas lagi ialah perkataan interdependensi. Dengan demikian “manusia sosial” berarti manusia yang saling tergantung kehidupannya satu sama lain. Interdependensi inilah yang merupakan satu-satunya jalan penyelesaian untuk mengatasi kenyataan bahwa manusia tidak memiliki apa yang oleh Freedman dan lain-lain disebut “*ready made adaptations to environment*”. Dependensi manusia tidak saja terdapat pada awal hidup manusia, akan tetapi dialami manusia seumur hidup sehingga komunikasi mempunyai peranan penting.

Masyarakat demokratik dianggap bahwa masyarakat dan individu komplementer satu sama lain, karena masyarakat tidak dapat dibayangkan tanpa individu, seperti juga individu tidak dapat dibayangkan tanpa adanya masyarakat. Betapa individu dan masyarakat komplementer satu sama lain dapat dilihat dari kenyataan, bahwa:

- a. Manusia dipengaruhi oleh masyarakat demi pembentukan pribadinya;
- b. Individu mempengaruhi masyarakat dan bahkan bisa menyebabkan (berdasarkan pengaruhnya) perubahan besar terhadap masyarakatnya.

Justru dari unsur yang kedua, yaitu bahwa individu dapat mengubah masyarakat sekelilingnya, terbukti bahwa manusia adalah selain dari hasil pendidikannya sebagai manusia yang berfikir, dapat mengambil kesimpulan dan

pelajaran dari pengalamannya, mencetuskannya menjadi ide yang baru. Dengan perubahan inilah, ia akan mengubah masyarakat sedikit demi sedikit dan akhirnya terjadilah apa yang dikenal sebagai proses sosial yaitu proses pembentukan masyarakat. Jadi, dapat dikatakan bahwa masyarakat selalu dalam proses sosial, selalu dalam pembentukan. Masyarakat selalu dalam perubahan, penyesuaian dan pembentukan diri (dalam dunia sekitarnya), sesuai dengan idenya. Karena masyarakat terdiri dari individu-individu yang juga berinteraksi satu sama lain, dengan sendirinya terjadilah perubahan terhadap masyarakat pula. Karena itu, proses sosial dapat pula didefinisikan sebagai perubahan-perubahan dalam struktur masyarakat sebagai hasil dari komunikasi dan usaha pengaruh mempengaruhi para individu dalam kelompok.

Di samping itu, karena individu secara tidak sadar sambil menyesuaikan diri juga mengubah secara tidak langsung (bersama-sama dengan individu lain) dan masyarakatnya, dapat dikatakan bahwa setiap individu maupun kelompok mempunyai peranan atau fungsi dalam masyarakatnya

2.3. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dalam penelitian ini maka peneliti memberikan perbandingan dengan menggunakan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Bentuk Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Nurfahima. 2018. Peran Pemerintah Dalam Konflik Antara Masyarakat Dengan PT PP Lonsum Di Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu pertama secara primer yaitu	Hasil penelitian ini menggambarkan dua hal pokok: 1). penyebab terjadinya konflik yaitu penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT. Lonsum, dimana penyerobotan lahan tersebut menggunakan tindak kekerasan, penggusuran dan pembakaran rumah warga. Masyarakat yang lahannya	Sama menggunakan metode penelitian kualitatif, teori yang sama sedangkan perbedaannya adalah dalam hasil penelitian

		<p>melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kedua secara skunder yaitu kajian pustaka melalui buku, jurnal skripsi, laporan tahunan dan situs internet terkait dengan judul penulis</p>	<p>direbut paksa oleh PT. Lonsum sampai sekarang masih berjuang, melakukan demonstrasi menuntut pemerintah Bulukumba mencabut hak guna usaha (HGU) Lonsum, dimana perkebunan karet ini dari tahun ketahun semakin meluas di Desa Tamatto dimana letak kantor dan pabrik pengelolaan karet tersebut beroperasi. 2). Peran pemerintah dalam menangani konflik yaitu pemerintah Bulukumba sudah melakukan mediasi, memfasilitasi dan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu sebagai orang pertama dalam mengambil kebijakan dan melakukan verifikasi Lahan, dalam hal ini. Pemerintah Bulukumba sudah melakukan verifikasi dan mengembalikan lahan masyarakat, akan pengembalian lahan yang dilakukan pemerintah tidak adil dan tidak merata. Meskipun penanganan dari pemerintah tersebut masih tergolong lemah, akan tetapi dalam hal ini pemerintah sudah bersikap netral, tanpa membedakan satu sama lainnya.</p>	<p>terdahulu mengkaji konflik masalah lahan sedangkan dalam penelitian ini adalah membahas tentang konflik agama dan konflik tawuran para remaja.</p>
2	<p>BambangWahyudi, Ningsih Susilawati. 2019. Peran Pemerintah daerah dalam penanganan potensi konflik antara imigran timur tengah dengan masyarakat Lokaldi Cisarua, Bogor, Jawa Barat</p>	<p>Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, data yang diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, serta dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis deskriptif.</p>	<p>Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Imigran di Cisarua Bogor Jawa Barat berpotensi menimbulkan konflik karena adanya akulturasi budaya yang tidak sesuai, pernikahan dengan pribumi dan penyalahgunaan dokumen. Penanganan potensi konflik dilakukan dengan upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik serta membangun sistem peringatan dini.</p>	<p>Sama menggunakan metode penelitian kualitatif, teori yang sama sedangkan perbedaannya adalah dalam hasil penelitian terdahulu mengkaji konflik masalah imigran sedangkan dalam penelitian ini adalah membahas tentang konflik agama dan konflik tawuran</p>

				para remaja.
3	Hendra Lumi. 2019, Peranan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Antar Kelompok (Suatu Study Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado)	Penelitian ini akan mengkaji tentang konflik antar kelompok yang terjadi di Kelurahan Teling Kecamatan Wanea yang sering berulang, dilihat dari peranan pemerintah dalam pencegahan dan penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah kota bersama Pemerintah Kelurahan yang bertugas menciptakan keamanan dan ketertiban warga ternyata belum dapat menemukan solusi yang pas dalam menangani perkelahian antar kelompok.	Sama menggunakan metode penelitian kualitatif, teori yang sama sedangkan perbedaannya adalah dalam hasil penelitian terdahulu mengkaji konflik masalah antar kelompok sedangkan dalam penelitian ini adalah membahas konflik agama dan konflik tawuran para remaja.

2.4. Kerangka Berpikir

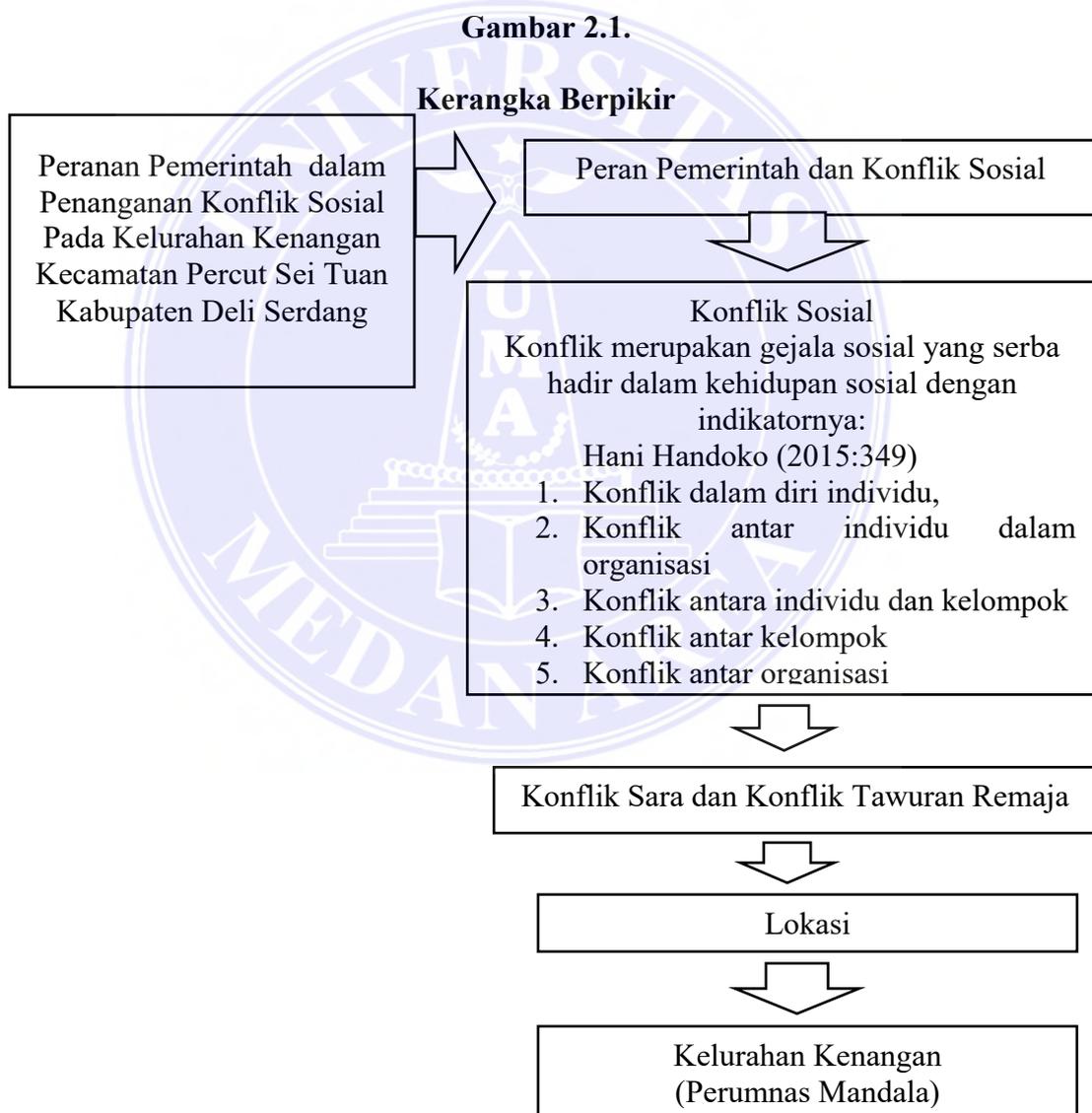
Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kajian penelitian dipersempit melalui peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antar kelompok.

Maka itu sangat diperlukan peranan pemerintah dalam menangani konflik dan pemerintah sebagai salah satu sebagai Mediator Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas. Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya. Hani Handoko (2015:349) Dalam penelitian yang merupakan

bagian dari konflik dalam bentuk:

1. Konflik dalam diri individu,
2. Konflik antar individu dalam organisasi
3. Konflik antara individu dan kelompok
4. Konflik antar kelompok
5. Konflik antar organisasi

Berikut kerangka berpikir yang disajikan oleh peneliti:



Sumber: Diolah Peneliti, 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode

Jenis metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini untuk memusatkan perhatian pada masalah- masalah atau fenomena yang ada serta mampu menggambarkan secara baik mengenai fakta di lapangan yang ada sehingga peneliti memberikan informasi apa adanya. Menurut Zuriyah (2006:47) penelitian dengan menggunakan Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Adapun bentuk penelitian ini adalah kualitatif sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, maka bentuk penelitian ini menitik beratkan pada proses, deskripsi analisis, yang bertujuan untuk mengetahui tentang Analisis Implementasi Program Jaminan persalinan di Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Menurut Juliansyah Noor (2020:33) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam Ilmu Pengetahuan Sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasan tersendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sasaran dari pendapat mereka ini diarahkan kepada individu atau organisasi ke dalam variable.

3.2. Tempat dan Lokasi Penelitian

1. Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Kenangan. Kecamatan Percut Sei Tuan. Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jl. Cucak Rw. II, Tegal Sari Mandala II, Kec. Percut Sei Tuan, Kota Medan, Sumatera Utara 20226
2. Waktu Penelitian. Penelitian ini direncanakan dilaksanakan mulai bulan Maret sampai dengan bulan September 2023.

Tabel. 3.1.
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian Tahun 2023						
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
1	Penyusunan Dan Bimbingan Proposal							
2	Seminar Proposal							
3	Pengambilan Data Survei							
4	Pengumpulan Data							
5	Seminar Hasil							
6	Penyelesaian Dan Bimbingan Skripsi							
7	Pengajuan Sidang Meja Hijau							
8	Sidang Meja Hijau							

Diolah: Peneliti Tahun 2023

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Poerwandari (2017:123) metode pengambilan data dalam penelitian kualitatif sangat beragam disesuaikan dengan masalah, tujuan penelitian serta sifat objek yang diteliti. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang merupakan teknik utama dalam

pengambilan data serta teknik observasi dan teknik dokumentasi sebagai pelengkap dalam penelitian. Berikut adalah penjelasan dari 3 teknik pengumpulan data tersebut:

1. Teknik Observasi

Penelitian juga menggunakan metode observasi sebagai pengambilan data tambahan. Menurut Kumar (dalam Poerwandari, 2007:135) observasi adalah kegiatan memperhatikan dan mendengarkan secara sistematis, selektif dan bertujuan. Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi sangat berguna untuk melengkapi data-data yang tidak diungkapkan dalam wawancara (Poerwandari, 2007:135). Patton (dalam Poerwandari, 2007: 135) menegaskan observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian, apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif.

2. Teknik Wawancara

Menurut Banister (dalam Poerwandari, 2007: 146) dijelaskan bahwa wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu mengenai topik yang ingin diteliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lain. Pada tahap ini peneliti akan melakukan wawancara dengan seorang informan yaitu ketua The Jak Mania di Kota Medan. Peneliti menggunakan pedoman wawancara, dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang dijadikan panduan selama proses berlangsung. Pedoman

wawancara dimaksudkan agar informasi yang diperoleh sama dari semua responden mencakup topik yang sama. Pedoman wawancara mengandung isu utama yang akan digali dari responden namun juga memberikan kesempatan pewawancara untuk mengeksplorasinya lebih dalam melalui pertanyaan-pertanyaan yang lebih khusus dan sempit.

- 1) Informan Kunci (*key*): Lurah
 - 2) Informan Utama : Kasubbbag Ketertiban dan Keamanan
 - 3) Informan Tambahan: Tokoh Agama sebanyak 1 orang dan Masyarakat sebanyak 1 orang yang aktif bergabung disalah satu organiasai kemasyarakatan di Kelurahan Kenangan Baru.
3. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk melengkapi informasi responden berupa, foto, tulisan, dan rekaman elektronik yang diciptakan untuk tujuan pribadi selama proses observasi dan wawancara terhadap informan berlangsung.

3.4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan tentang kondisi data dan informasi yang didapatkan serta gejala - gejala yang ada.

Menurut Juliansyah Noor (2020:36) adalah proses pengorganisasian dan mengurut data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data dilapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian diolah agar sistematis mulai dari mengedit data, mengklarifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan. Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2019:48) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tiga, kemudian kembali ke tahap satu. Secara garis besar mereka membagi analisis data dalam penelitian kualitatif kedalam tiga tahap yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat di verifikasi. Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat. Dalam melakukan pengujian data, peneliti menggunakan landasan teori pada bab dua, sehingga akan di cocokkan apakah terdapat persamaan atau perbedaan.

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya yaitu peneliti melakukan penyajian data dalam melakukan pengujian data, peneliti menggunakan landasan teori pada bab dua, sehingga akan di cocokkan apakah terdapat persamaan atau perbedaan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yang dilakukan peneliti yaitu, membuat kesimpulan dari data-data yang telah di dapatkan selama penelitian, penarikan kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab perumusan masalah dalam penelitian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Lurah dalam Penanganan Konflik Sosial pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sudah tergolong cukup baik hal ini Lurah memberikan pada masyarakat berbagai edukasi dan pemahaman mengenai keberagaman suku, budaya, dan agama. Selain itu, Lurah juga memberikan pada masyarakat tentang memupuk sikap toleransi, kerja sama, gotong royong, saling menghargai, dan menghormati antar sesama suku, agama, dan bangsa. Selanjutnya Peran Lurah mampu menggandeng pihak kepolisian, TNI, serta Tokoh masyarakat dalam penyelesaian tentang isu sara khususnya di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Hambatan dan Upaya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yaitu factor hambatannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan pertauran perundang undangan dalam konflik isu SARA dan Kurangnya kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan konflik . Sedangkan untuk factor upaya adalah membentuk forum musyawarah yang di gunakan dalam menyelesaikan masalah konflik isu SARA, melakukan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekontruksi serta mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada seluruh masyarakat Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu sosial yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa setiap ada masalah jangan langsung mengambil kesimpulan sepihak tanpa melalui musyawarah.
2. Sebagai Lurah di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang maka harus memprogramkan sosialisasi-sosialisasi persatuan membumikan Pancasila di tengah-tengah masyarakat agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Astrid Susanto, 2016. Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial., Bandung: Bina Cipta.
- Ambarwati, Fitri Respati. 2014. Konsep Kebutuhan Dasar Manusia. Yogyakarta: Dua Satria Offset.
- Bagong Suyanto, 2005. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2015. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Handoko.Hani (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Pertama. Penerbit: Pustaka Setia, Bandung.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Juliansyah Noor, 2020. Metode Penelitian Kualitatif, Kencana Prenada Media Group.
- Robert H. Lauer, 2011. Perspektif Tentang Perubahan Sosial, (Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Raho, Bernard. 2017. Teori Sosiologi Modern. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Rotua Kristin Simamora, Rudi Salam Sinaga. 2016.. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area.
- R Hamdani Harahap, Ridwan Hanafiah, Rudi Salam Sinaga. 2018. Pendayagunaan Kelompok Diskusi Mahasiswa dalam Menangkal Paham Radikalisme dan Paham Terorisme di Lingkungan Perguruan Tinggi. Penerbit: INA-Rxiv. Vol. 3 No. 1 (2018): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
- Kusnadi, 2012. Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja, (Malang : Taroda,
- Muluk, 2015, "Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah", Bayumedia. Publishing, Malang., Sistem Sosial Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta:
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Soerjono Soekanto 2011., Sosiologi Suatu Pengantar,(Jakarta: Rajawali Pers, 1992), Dr. Robert H. Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, (Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Setiadi dan Usman Kolip,2011. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Soetomo, Masalah . 2015. Sosial dan Pembangunan, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.

Schulte Nordholt . 2017. *The political system*. Jakarta: Yayasan Obor. Indonesia-KITLV.

Wirutomo, Paulus Dkk. (2011). Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: UI Press.

Tutik, Dyah Aruning Puspita, Aminul Amin, dan Kashan Pirzada. (2019). *“The Implementation of Good Corporate Governance*

JURNAL

1. Rudi Salam Sinaga. 2016.. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Rudi Salam Sinaga. 2018. Pendayagunaan Kelompok Diskusi Mahasiswa dalam Menangkal Paham Radikalisme dan Paham Terorisme di Lingkungan Perguruan Tinggi.
3. Nurfahima . 2018. Peran Pemerintah Dalam Konflik Antara Masyarakat Dengan PT PP Lonsum Di Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukum.
4. Bambang Wahyudi, Ningsih Susilawati. 2019. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Potensi Konflik Antara Imigran Timur Tengah Dengan Masyarakat Lokaldi Cisarua, Bogor, Jawa Barat
5. Hendra lumi. 2019, Peranan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Antar Kelompok (Suatu Study Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado)

LAMPIRAN I

WAWANCARA PENELITIAN

PERANAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PADA KELURAHAN KENANGAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

Sehubungan dengan penyusunan skripsi dengan judul yang telah disebutkan di atas, maka dengan hormat, saya :

Nama : **LESTARI LAWOLO**

NIM : **198520120**

Memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan wawancara (daftar pertanyaan) yang saya ajukan ini secara jujur dan terbuka. Daftar pertanyaan ini saya ajukan semata-mata untuk keperluan penelitian sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang Strata satu (S1), Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, Medan, Sumatera Utara. Karenanya, kebenaran dan kelengkapan jawaban yang anda berikan akan sangat membantu bagi penulis, untuk selanjutnya akan menjadi masukan yang bermanfaat bagi hasil penelitian yang penulis lakukan.

Atas partisipasi Bapak/Ibu dalam menjawab daftar pertanyaan ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

LESTARI LAWOLO

I. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin anda : Laki – laki
 Perempuan
3. Pekerjaan :
4. Usia anda saat ini adalah : <25 tahun 25 - 50 tahun
 >50 tahun

LAMPIRAN II PANDUAN WAWANCARA

No	Peranan Pemerintah dalam Penanganan Konflik Sosial pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	Informan		
		Kunci	Utama	Tambahan
1	Bagaimana Kebijakan seorang lurah dalam menghadapi konflik sosial di kelurahan kenangan seperti isu sara?			
2	Bagaimana apabila terdapat dua pihak secara perorangan maupun kelompok yang terlibat dalam interaksi yang saling bertentangan di Kelurahan kenangan menghadapi Isu sara serta tawuran yang terjadi di kalangan remaja?			
3	Bagaimana peran Lurah dengan terjadinya pertentangan antara dua pihak dalam mencapai tujuan, memainkan peran, atau adanya norma dan nilai yang berlawanan di Kelurahan kenangan menghadapi Isu sara serta tawuran yang terjadi di kalangan remaja?			
4	Bagaimana Lurah dalam memebrikan gerakan terhadap jajaran Keleurahan menghadapi konflik social?			
5	Langkah apa saja yang akan diberikan pihak Keluarahan dalam penanganan konflik social di Keluarahan Kenangan?			
6	Bagaimana Upaya penyelesaian konflik horizontal Isu Sara dan tawuran dikalangan remaja di Kelurahan Kenangan?			
7	Bagaimana peran Lurah dalam menghadapi konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan di kalangan masyarakat khususnya tentang Isu Sara			
8	Bagaimana cara Lurah dalam melibatkan Stakeholder dalam menciptakan mediasi antar warga yang terjadi pertikaian tentang Isu Sara yang terjadi di Kelurahan Kenangan?			

LAMPIRAN III DOKUMENTASI



Wawancara Bersama informan kunci dengan Bapak A. Hakim Nasution, SE selaku Lurah di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Pada Tanggal 26 Mei 2023. Pukul 9.30 Wib. tentang Peranan Pemerintah dalam Penanganan Konflik Sosial pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang



Wawancara Bersama informan kunci dengan Ibu Desvianti Rambe selaku Kasi. Ketertiban dan Keamanan di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Pada Tanggal 26 Mei 2023. Pukul 9.40 Wib. tentang Peranan Pemerintah dalam Penanganan Konflik Sosial pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang



Wawancara Bersama informan kunci dengan Bapak Ustadz Muhammad Phata Wasin. S.Ag selaku Lurah di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Pada Tanggal 26 Mei 2023. Pukul 9.45 Wib. tentang Peranan Pemerintah dalam Penanganan Konflik Sosial pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang



Wawancara Bersama informan kunci dengan Ibu Elda Hafni Nasution selaku Lurah di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Pada Tanggal 26 Mei 2023. Pukul 10.00 Wib. tentang Peranan Pemerintah dalam Penanganan Konflik Sosial pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang